

Siaran Pers
Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua
Menyikapi Kriminalisasi dan Pengalihan Isu Pemerkosaan
dan Pembakaran Rumah Warga

Mengapa Kami Demo?

Sejarah rakyat Papua merupakan sejarah yang penuh dengan darah. Praktek sistem kolonialisme Indonesia tak pernah berhenti melahirkan kesengsaraan bagi Rakyat Papua. Penyiksaan, penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, penangkapan sewenang-wenang, perampasan tanah, hingga rasisme terus menyelimuti lembar-lembar kehidupan dan menyudutkan rakyat Papua.

Aksi Demo Damai Front Rakyat Papua Peduli Hak Asasi Manusia Papua pada hari Jumat 05 April 2024 di Nabire merupakan aksi Demo Damai memprotes beredar sebuah video penyiksaan TNI terhadap seorang warga sipil di Papua. Dalam video itu, korban diredam dalam drum berisi air dengan kedua tangannya diikat ke belakang. Korban secara bergantian dipukuli dan ditendang oleh sejumlah anggota TNI. Punggung korban juga disayat dengan pisau.

Penyiksaan itu terjadi pada tanggal 03 Februari 2024 di Kabupaten Puncak, Papua. Korban yang diredam dan disiksa adalah Delpius Kogoya. Ia ditangkap bersama Warinus Murib dan Alinus Murib. Mereka ditangkap dengan tuduhan sebagai mata-mata TPNPB-OPM; suatu tuduhan murahan yang kemudian tidak dapat dibuktikan sama sekali oleh TNI dan Polisi. Mereka bertiga ditangkap saat TNI melakukan penyisiran di Distrik Amukia dan Distrik Gome. Warinus Murib saat ditangkap, kakinya diikat dan disambungkan ke mobil. Ia diseret sejauh 1 Km, sebelum akhirnya disiksa. Sementara Alinus juga dibawa ke pos TNI dan disiksa. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya diserahkan ke pos polisi karena tidak cukup bukti untuk membuktikan tuduhan dan kejahatan TNI.

Tujuan Demo Damai

Demo Damai Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua mendesak pemerintah agar bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terus terjadi dan meningkat serta menghentikan tindakan-tindakan represif oleh aparat di Papua. Dimulai dari saat diberlakukannya operasi militer pada tahun 1962 sampai saat ini yang menewaskan sekitar 500.000 sampai 600.000 OAP (Orang Asli Papua). Pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua, beserta impunitas bagi pelaku, juga masih terus berlanjut sampai sekarang.

Pembungkaman Ruang Demokrasi

Kebebasan berpendapat merupakan hal penting di dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia. Pemerintah telah menjamin kebebasan berpendapat dengan mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukumnya. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap manusia yang merupakan anugerah yang harus dipertahankan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat sesuai Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang diatur selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Sesuai dengan UUD 1945 kami Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua telah mengeluarkan surat pemberitahuan aksi demo Damai kepada Kepolisian Nabire Papua Tengah pada Rabu, 03 April 2024. Demo Damai ini dilaksanakan pada Jumat, 05 April 2024. Namun dalam menangani Aksi Demo Damai Front Rakyat Papua Peduli Hak Asasi Manusia Papua pada Jumat, 05 April 2024. Gabungan TNI Polri membubarkan paksa Massa Aksi dengan menggunakan wapen/karet mati dan menembak gas air mata, peluru karet, peluru timah serta polisi menggunakan Pisau menikam massa aksi.

Dampak Dari Pembungkaman Ruang Demokrasi

Gabungan TNI Polri menuduh Kebakaran Rumah dan Pemerkosaan itu di lakukan oleh masa aksi Demo Damai. Seperti yang diberitakan di beberapa Media online. Dalam surat pemberitahuan aksi kami layangkan kepada kepolisian Nabire telah menyertakan titik kumpul aksi Demo Damai ada 5 titik kumpul yaitu 1. Depan Rumah Sakit Umum Nabire 2. Gapura Kampus USWIM 3. Pasar Karang Tumaritis 4 Perempatan Hotel Jepara II dan 5. Perempatan SP.

Keputusan Rapat kami Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua pada hari Selasa, 02 April 2024 di Graha STT Walter Post Nabire Papua Tengah **bahwa Aksi Demo kami adalah Demo Damai memprotes kekerasan dan pelanggaran HAM** yang dilakukan oleh TNI Polri terhadap manusia Papua untuk mengamankan perampasan Lahan, eksploitasi Sumber Daya Alam dan Lainnya di Papua.

Dalam menangani Aksi Demo Damai Gabungan TNI Polri tanpa negosiasi dengan massa aksi langsung membubarkan paksa menggunakan wapen/karet mati dan menembak gas air mata, peluru karet, peluru timah serta polisi menggunakan Pisau menikam massa aksi.

Kami Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua. sebanyak 54 orang dibubarkan, diangkut paksa dan ditahan oleh pasukan gabungan TNI POLRI ke Polres Nabire. 48 Orang dibebaskan dan dipulangkan jam 03.00 sore pada hari Sabtu, 06 April 2024, dua (2) orang dipulangkan pada jam 23.39 malam pada hari Sabtu, 06 April 2024 kemudian 3 orang lainnya dipulangkan pada hari Minggu subuh, 07 April 2024 dan 1 orang masih ditahan sampai saat ini atas nama Leo Bagau. Sebanyak 18 orang luka-luka, akibat kena peluru karet, Gas air mata, karet mati/wapen, dan peluru timah. 100-an massa aksi mengalami gangguan pernafasan karena menghirup asap gas air mata.

Banyak motor milik massa aksi yang diangkut dan dirusakkan oleh gabungan TNI POLRI. Banyak korban luka yang dirawat dirumah karena dirumah sakit Umum dijaga ketat oleh gabungan TNI-POLRI. 5 Orang anak dibawah umur menjadi korban kekerasan TNI-POLRI.

Musuh Rakyat Papua

Perlawanan yang terus digulirkan oleh rakyat Papua sejatinya adalah melawan sistem penindasan yang menindas rakyat Papua secara politik, mengeksploitasi secara ekonomi dan terus meneror, menyiksa, membunuh rakyat Papua melalui praktek militeristik.

Kami Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua tidak sedang melawan dan membangun permusuhan dengan suku, ras dan agama tertentu yang ada di kota Nabire. Rakyat Papua dan rakyat Indonesia di Nabire jangan mau diadu domba oleh TNI POLRI yang selama ini membungkam ruang demokrasi bagi gerakan rakyat di Nabire.

TNI-POLRI sebagai anjing penjaga modal Internasional yang mencuri sumber daya alam Papua, alat represif gerakan rakyat, alat pembungkaman ruang demokrasi, dan mesin pembunuh rakyat Papua. Jelaslah bahwa musuh rakyat Papua bukan rakyat Indonesia.

TNI POLRI terus menggunakan kasus pemerkosaan dan pembakaran rumah di Jayanti sebagai alat untuk mengkriminalisasi Gerakan Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua dan menyembunyikan fakta Pembubaran Paksa, sikap anti demokrasi terhadap aksi rakyat Papua pada Jumat, 5 April 2024 di Nabire.

Berdasarkan itu kami Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua menghimbau dan menyatakan sikap:

1. Rakyat Papua dan rakyat Indonesia yang ada di Nabire **jangan terprovokasi dengan upaya Konflik Horizontal** yang dibangun oleh TNI POLRI dan mari bersama-sama sebagai umat beragama menjaga keamanan selama Hari Raya Lebaran di Nabire.
2. Kami **mengecam tindakan pemerkosaan terhadap 2 warga** berinisial A (24 Tahun) dan RD (27 Tahun) oleh Orang Tak dikenal di Kompleks Jayanti yang jauh dari titik aksi Jepara II.
3. TNI POLRI **hentikan upaya penculikan, penangkapan dan kriminalisasi** terhadap massa aksi demo damai Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua di Nabire.
4. Kami **mengecam pembakaran rumah milik keluarga Sulistino** di Jalan Jayanti Kompleks Perumahan Pemda oleh Orang Tak dikenal yang jauh dari titik aksi Jepara II.
5. **Mengutuk tindakan bantuan yang Diskriminatif** oleh PJ.Gubernur Papua Tengah yang mengganti rugi kebakaran rumah tetapi tidak membantu kerugian yang dialami massa aksi demo damai Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua.
6. TNI POLRI **hentikan upaya pengalihan isu dan provokasi** antara rakyat papua dan rakyat Indonesia di Nabire.
7. **Segera copot Kapolres Nabire** yang anti terhadap Ruang Demokrasi dan Gerakan Rakyat di Nabire.
8. Kami Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua **tetap akan melakukan aksi lanjutan** dengan tuntutan keadilan bagi 3 masyarakat Sipil Papua korban Penyiksaan dan Pembunuhan yang dilakukan oleh 13 Anggota TNI dari Satuan Batalyon Yonif 300 Raider/ Bara Wijaya dibawah Komando III Siliwangi yang dilakukan pada 03 Februari 2024 di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
9. Rakyat Papua dan Rakyat Indonesia yang berada di Nabire mari bersatu **menyelamatkan ruang demokrasi Rakyat di Nabire** sehingga semua aspirasi dapat tersampaikan tanpa adanya pembungkaman oleh TNI POLRI yang terus merekayasa situasi. Mari wujudkan Nabire yang ramah demokrasi rakyat.
10. **Segera usut dan adili TNI PORLI yang melakukan kekerasan terhadap 4 Wartawan** saat meliput aksi demo damai Rakyat Peduli HAM pada 5 April 2024.

Demikian himbauan dan pernyataan sikap Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua, Mari seluruh rakyat bersatu demi mewujudkan pembebasan manusia yang sejati dari tirani penindasan.

Nabire, 08 April 2024

Juru Bicara
Yeti Tagi

Koordinator Umum
Martinus Dogomo

Penanggung Jawab
1. Yohanes Giyai
2. Adhen Dimii